

## PERJUANGAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) DARI KONGRES X HINGGA KONGRES XXI UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITABANGSA INDONESIA

Dila Muhaimin<sup>\*1</sup>, Ratna Kumala<sup>2</sup>, Puji Rahayu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

\*Corresponding Author:

Email: [muhaimindila9@gmail.com](mailto:muhaimindila9@gmail.com)

---

### Abstract.

*The development of the Indonesian Teachers Association (PGRI) from the X congress to the XXI congress where from the congress resulted in various problem solving, planning and realizing the ideals and goals of PGRI as a professional organization through the holding of the X congress to the XXI congress in 1962 to 2013. X in October 1962 produced the PGRI principle which became the principle of Pancasila and the Manipol-Usdek, followed by the XI congress from the political field to produce Pancasila as the basis of the State as stated in the Preamble to the 1945 Constitution and in the field of organization to make PGRI a member of the WCOTP (World Confederation of Organization of Teaching Profession). In 1970 in Bandung the XII congress was held which resulted in a review of the AD/ART of PGRI including the symbol of PGRI, Mars PGRI and so on, followed up by the XIII congress in 1973 with the results of the determination of the code of ethics for Indonesian teachers. On 26-30 June 1979 the XIV congress was held in Jakarta that PGRI was willing to host the 27th World Teacher Congress, followed by the XV congress on 16-21 July in Jakarta with the results of Completion of AD/ART and these are the main points principal of PGRI for the next five years (1984-1989). Including the scope, development, organizational development of PGRI, roles and responsibilities of PGRI in participating in the success of the 198 SU MPR, Repelita IV and Pancakrida of the Cabinet of Development V. The XVI Congress which was held in Jakarta on 3-8 July resulted in one of them being to increase the efforts of teacher cooperatives. , then the XVII congress which was held from 03-08 July 1994, in Jakarta, the advisory board was appointed as an advisory board and also formed a team of writers of a book entitled "History of PGRI from time to time" and at this congress also succeeded in formulating a strategy of struggle in period of 25 years. At the XVIII congress, which was held on November 25-28, 1998 in Lembang, Bandung with the results of PGRI as an organization of struggle, educational staff, and professions, it was continued on to the XIX which was held at the Patra Jasa hotel, Semarang on July 8-12, 2003. is PGRI asking for teacher safety guarantees to the central government. The XXth congress which was held in 2008 from 30 June to 4 July resulted in a stronger and more dignified PGRI and the XXI congress which was held from 01 to 05 July 2013 at Istora Senayan Jakarta with the result of affirming the conscience of PGRI, which started from the association professions, struggle groups and labor organizations. By holding these congresses, it aims to maintain and complete the Unitary State of the Republic of Indonesia as well as to improve education and education in a populist manner as well as a place for the development of knowledge.*

*Keywords: PGRI, Congress, Teachers*

---

### 1. PENDAHULUAN

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah organisasi Indonesia yang beranggotakan sebagai guru. Berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan nama Persatuan Pengajar Hindia Belanda (PGHB) yang didirikan pada tahun 1912 pada masa Belanda dengan semangat perjuangan para guru pribumi akhirnya dirubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada masa

kedudukan Jepang, namun PGRI tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya karena semua organisasi dilarang dan sekolah ditutup (Fernando, 2017). Akhirnya tepat seratus hari setelah kemerdekaan Indonesia PGRI resmi didirikan pada tanggal 25 November tahun 1945. Dalam perjalanan PGRI dari dahulu hingga sekarang mengalami banyak perkembangan akibat terjadinya suatu pertemuan besar dari pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dalam pengambilan keputusan bersama atau sering disebut sebagai Kongres. Diadakannya Kongres guna untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama lewat suatu wadah organisasi guru yaitu PGRI. Dari Kongres X hingga Kongres XXI yang diadakan para pejuang PGRI menghasilkan berbagai pemecahan masalah yang berbeda-beda dari setiap Kongres, dari Kongres ke X yang diketuai oleh ketua umum : M.E. Soebiadinata, ketua 1 : M. Hoesein, dan ketua 2 : Soebadri terjadi pada bulan Oktober 1962 yang bertempat di Glora Bung Karno, Jakarta pada periode tahun 1962-1965 menghasilkan pembersihan dunia pendidikan Indonesia dari urusan PKI. Kongres keXI yang diketuai oleh , ketua umum : M.E. Soebiadinata, ketua 1 : Dra.Mien S. Warnaen dan ketua 2 : Maderman B.A. pada tanggal 15-20 Maret 1967 dan bertempat di Gedung Bioskop Alun-Alun Bandung menghasilkan 1. Menangkan perjuangan membangun orde baru untuk terwujudnya Dwi Dharma dan Catur Kabinet Ampera, 2. Sepenuhnya menyetujui keputusan dan keputusan Sidang Paripurna Istimewa MPR, 3. Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 4. Menjunjung tinggi HAM, 5. Menghapus sisa-sisa PKI, 6. PGRI Non Vaksentral, SSP, PGTI dinyatakan sebagai organisasi masyarakat terlarang karena merupakan organisasi masyarakat PKI, 7. Pengaktifan kembali 27 staf Kementerian P&K yang dipimpin Profesor Prijono, dilanjutkan Kongres ke XII pada tahun 1970, kongres PGRI ke XII yang dipimpin Basyuni Suriamiharja menjadi yang terlama ke-2 dalam memimpin setelah M.E.

Subiadinata selama lebih dari 25 tahun dan Basyuni Suriamiharja menjadi ketua umum, dan ketua 1: Slamet I, dan ketua 2 : Maderman B.A menghasilkan 1. PGRI sebagai organisasi profesional, 2. Peninjauan AD/ART PGRI termasuk lambing PGRI, Mars PGRI dan lain sebagainya, 3. Kode etik guru, 4. Pengesahan status guru hasil rekomendasi UNESCO/ILO. Kongres ke XIII diketuai oleh , ketua umum : Basyuni Suriamiharja, ketua 1 : Prof. Dr. Wnarno Surakmad, ketua 2 : DRS. Madorman yang dilaksanakan pada tanggal 21-25 November 1973 di Jakarta menghasilkan 1. Adanya Dewan Pembinaan PGRI, 2. Partisipasi kepada masyarakat dan pemerintah, 3. Ditetapkannya kode etik guru Indonesia, 4. Hubungan PGRI dan Golkar (Wandi & Nurhafizah, 2019), pada Kongres ke XIV yang diketuai oleh , ketua umum : Basyuni Suriamiharja, ketua 1 : Prof. Dr Amran Halim yang dilaksanakan pada tanggal 26-30 Juni 1979 di Jakarta menghasilkan 1. PGRI bersedia menjadi tuan rumah kongres guru ke-27 se dunia, 2. Menjadi penyusun sistem pendidikan nasional, 3. Waktu libur di bulan puasa, 4. Penjabaran kode etik guru, 5. Sebagai pendiri Wisma Guru. Kongres ke XV yang diketuai oleh , ketua umum : Basyuni Suriamiharja, ketua : Dr. Anwar Jasin, M.Ed, ketua : Prof. Dr Amran Halim yang dilaksanakan pada tanggal 16-21 Juli 1984 di Jakarta menghasilkan 1. Penyempurnaan AD/ART, 2. Menguraikan pokok-pokok PGRI untuk lima tahun ke depan (1984-1989) dan menggambarkan ruang lingkup organisasi PGRI, perkembangannya, perannya dalam berpartisipasi dalam keberhasilan SU MPR 1983, Repelita IV dan Pancakrida yang meliputi tanggung jawab, termasuk Kabinet Pembangunan ke V, selanjutnya pada Kongres ke XVI yang diketuai oleh, ketua umum: Basyuni suriamiharja, ketua: Drs. I Gusti Agung Gde Oka. pada kongres ini dilakukan pada tanggal 3-8 Juli 1989 di Jakarta menghasilkan 1. Sikap dan pernyataan tentang sistem pendidikan nasional terhadap keluarnya UU No.2. 2. Meningkatkan usaha koperasi guru. 3. Sikap dan pernyataan terhadap keputusan menpan No. 26/menpan/1989, berharap agar diberlakukannya sistem KPO.

Pada Kongres ke XVII diketuai oleh, ketua umum: Basyumi suriamiharja, ketua: Drs. I Gusti Agung Gde Oka. Pada kongres ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3-8 Juli 1994 menghasilkan 1. Dewan Pembina yang berubah nama menjadi Dewan Penasehat, 2. Pembentukan tim penulisan sejarah PGRI, 3. Mampu mempertahankan kehadiran PGRI di pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun lewat kecerdasan PB PGRI, selanjutnya hasil dari Kongres ke XVIII diketuai oleh, ketua umum: Prof. Dr. H. Mohammad surya, ketua: Drs. H. Alwi Nurdin, MM. pada kongres ini diselenggarakan di lembang, bandung Pada tanggal 25-28 November 1998 dengan hasil PGRI sebagai organisasi perjuangan, tenaga kependidikan, dan profesi. Pada tanggal 8-12 Juli 2003

diselenggarakannya Kongres ke XIX bertempat di Hotel Patra Jasa Semarang, Jawa Tengah dengan hasil 1. PGRI meminta agar jaminan keamanan guru kepada pemerintahan pusat. 2. Penegasan jati diri PGRI. 3. PGRI juga mengadakan UU guru dandosen 4. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah didesak oleh PGRI agar menyediakan dengan pendidikan paling sedikit 20% dari APBN dan APBD, selanjutandiselenggarakannya Kongres ke XX diketuai oleh, ketua umum: Dr. Sulistiyo, M.Pd, ketua: Prof. Dr. Anah Suhaenah. Kongres ini diadakan di hotel Novotel Palembang, Sumatra selatan pada tanggal 30 Juni- 4 Juli tahun 2008 dengan hasil 1. Dewan kehormatan guru telah ditetapkan. 2. Menjadikan PGRI yang lebih kuat danbermartabat. 3. PGRI memberi himbauan kepada pemerintah agar semua guru sudah bersertifikat pendidik. Kongres ini dihadiri oleh 1728 peserta yang mempunyai tekad agar berhasilnya pemilu pada tahun 2009. Dan Kongres ke XXI diketuai oleh, ketua umum: DR. Sulistiyo, M.Pd, ketua: Dr. UNifah Rosyidi, M.Pd. kongres ini diselenggarakan di istana senayan Jakarta pada tanggal 1-5 Juli tahun 2013 menghasilkan ada perubahan AD/ART PGRI sesuai dengan peraturan perundang- undangan, penegasan urutan jati diri PGRI yang bermula organisasi profesi, organisasi perjuangan, organisasi ketenagakerjaan (Yuniastik, 2013).

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian dengan melakukan pengumpulan data atau informasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dasarnya berpijak di pemikiran kritis terhadap bahan pustaka. Sebelemun melakukannya, peneliti diwajibkan mengetahui mengenai dari mana sumber informasi tersebut. Metode ini termasuk metode deskriptif, metode deskriptif berfokus di penjelasan sistematis mengenai fakta saat penelitian dilaksanakan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk Mewujudkan Cita-Cita Bangsa Indonesia lewat Kongres X hingga Kongres XXI meliputi :

### Kongres X

Yang diketuai oleh , ketua umum : M.E. Soebiadinita, ketua 1 : M. Hoesein, dan ketua 2 : Soebadri terjadi pada bulan Oktober 1962 yang bertempat di Glora Bung Karno Jakarta pada periode tahun 1962-1965 dan pada masa periode ini terjadi perpecahan didalam tubuh PGRI karena pengaruh kongres yang disepakati untuk memasukkan Pancasila dan Manipol-Usdek (Manifesto Politik/Undang-Undang Dasar 1945) sebagai dasar PGRI. Dalam hal ini cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud adalah PGRI tidak boleh masuk atau terlibat dalam politik, dimana Kongres X menyatakan bahwa memasukkan Manipol-Usdek (Manifesto Politik/Undang-Undang Dasar 1945) sebagai dasar PGRI, terlihat jelas ada penyusupan PKI kedalam tubuh PGRI. PKI berusaha menyusupi dan melaksanakan pendidikan “Panca Cinta dan “Panca Tinggi” pada sistem Pancawardhan (Nursidik, 2019). Akan tetapi golongan Pancasila lebih kuat dan mampu bertahan sehingga golongan PKI tidak bisa melakukan taktik absorpsi terhadap PGRI, pada tahun 1964 Soebadri di pecat karena terlibat makar dengan membentuk PGRI non-Vak setral, kemudian ketua 2 di ganti oleh H.M. Hidayat.

### Kongres XI

Yang diketuai oleh , ketua umum : M.E. Soebiadinita, ketua 1 : Dra.Mien S. Warnaen , dan ketua 2 : Maderman B.A. yang memiliki rencana melaksanakan kongres pada tahun 1965 akan tetapi tertunda sebanyak dua kali pada bulan November tahun 1965 dan tahun 1966 karena terjadi peristiwa G30-S/PKI dan karena adanya “dualisme” dalam kepemimpinan negara dalam kehidupan politik dimana pendukung orde baru tidak mengakui kepemimpinan Soeharto dan pendukung orde baru tidak mengakui kekuasaanIr Soekarno. (Prasetyo, dkk., 2020). Pada awal tahun 1967 setelah melewati persiapan dimana selama tahun 1966 PGRI disibukkan dengan tugas-tugas utama Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) dan konsolidasi organisasi dalam mempersiapkan kongres “PGRI Orde Baru” (kongres XI) di Bandung(Nursidik, 2019). Misi utama KAGI adalah membebaskan masyarakat

pendidikan Indonesia dari PKI, orde lama PGRI, Persatuan Pendidikan dan PETI, menyatukan guru ke satu wadah organisasi yang disebut Persatuan Guru Republik Indonesia, menjadikan PGRI bukan hanya unitaristik, tapi organisasi guru yang mandiri dan non politik. 1. Menangkan pertarungan Kabinet Ampera untuk mengembangkan orde baru bagi Dwi Dharma dan Catur Karya, 2. Mendukung Resolusi dan Resolusi Majelis Khusus MPR, 3. Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 4. Menjunjung HAM, 5. Menghapus sisa-sisa PKI, 6. PGRI Non Vaksentral, SSP, PGTI dinyatakan sebagai organisasi masyarakat terlarang karena merupakan organisasi masyarakat PKI 7. Pengaktifan kembali 27 staf Kementerian P&K yang dipimpin Profesor Prijono. Dalam bidang organisasi salah satunya adalah PGRI menjadi anggota WCOTP (World Confederation of Organisation of Teaching Prifession) dan menyatakan PGRI siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Regional Confrence (ARC WCOTP) yang diketuai oleh Slamet I dan sekretaris H.M. Hidayat dalam pelaksanaan konferensi ini telah berhasil membuka cakrawala baru dalam hubungan internasional PGRI.

### **Kongres XII**

Pada tahun 1970, kongres XII Basyuni Suriamiharja menjadi orang ke-2 paling lama dalam memimpin PGRI setelah M.E. Subiadinata selama lebih dari 25 tahun dan Basyuni Suriamiharja menjadi ketua umum, dan ketua 1: Slamet I, dan ketua 2 : Maderman B.A. Pada kongres ini PGRI terancam pembubaran karena ikut serta dalam memelopori terbentuknya Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) yang nantinya akan diganti menjadi Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FSBI), akan tetapi PGRI dilarang ikut bekerja sama dengan serikat buruh karena jika tetap ikut dalam serikat buruh maka akan dihadapkan dengan pembubaran organisasi oleh pemerintah Orde Baru (Hastantyo, dkk., 2019) Pada tanggal 5 Oktober 1966 terbitlah kongres yang disahkan dari rekomendasi ILO/UNESCO yang berisi tentang Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan guru, termasuk perlunya partisipasi guru dalam kehidupan sosial bermasyarakat, Guru harus bebas memainkan perannya dalam jabatan publik, Hak guru mengenai perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, dan lain-lain. Ini tidak hanya menyangkut hak-hak guru, tetapi juga tugas dan tanggung jawab yang harus mereka jalankan diantaranya 1. Semua guru harus berusaha untuk mencapai standar yang tinggi dalam semua pekerjaan profesional mereka, standar profesional berkaitan dengan kinerja guru dengan ikut berpartisipasi dalam organisasi guru, 2. Organisasi guru harus bekerjasama penuh dengan pihak berwenang, 3. Perilaku guru diatur dalam kode etik, 4. Dalam kegiatan ekstrakurikuler guru harus berperan aktif. Dalam hal ini cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud dalam kongres ini adalah guru belum bisa mencapai standar profesional yang berkaitan dengan kinerja dan masih banyak guru yang melakukan pelanggaran kode etik. Seperti contoh : melakukan tindak kekerasan terhadap siswanya.

### **Kongres XIII**

Yang diketuai oleh , ketua umum : Basyuni Suriamiharja, ketua 1 : Prof. Dr. Wnarno Surakmad, ketua 2 : DRS. Madorman yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 25 November tahun 1973. PGRI merupakan satu-satunya organisasi profesi guru Indonesia yang menentukan sikap politiknya untuk ikut serta dalam menyampaikan aspirasi melalui Golkar yang sebagaimana tertuang dalam piagam PGRI (Hastantyo, dkk., 2019). Manfaat dari keputusan ini didukung oleh pemerintah dan Golkar sehingga anggota merasa mudah untuk mendapatkan posisi dan dana yang ditawarkan oleh pemerintahan Orde Baru. Sehubungan dengan hal tersebut kongres XIII menghasilkan 1. Adanya Dewan Pembinaan PGRI, 2. Partisipasi kepada masyarakat dan pemerintah, 3. Ditetapkannya kode etik guru Indonesia, 4. Hubungan PGRI dan Golkar. Pada kongres ke XIII ini cita-cita PGRI yang belum terwujud yaitu PGRI tidak boleh masuk atau terlibat dalam politik manapun.

### **Kongres XIV**

Yang diketuai oleh , ketua umum : Basyuni Suriamiharja, ketua 1 : Prof. Dr Amran Halim yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Juni tahun 1979. Dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan menerima pendidikan maka, PGRI sejak awal berdiri telah mendirikan atau menyelenggarakan sekolah-sekolah (Anggraini Ningsih, 2014). Sampai akhir tahun 1979 belum ada

pembinaan yang terarah sehingga peraturan pengelolaan dan pembinaannya sangat beraneka ragam dan menimbulkan kurangnya keefesienan dan keefektifan pengelolaan sekolah. Pada tahun 1973 di Jakarta kongres ini juga menetapkan kode etik guru Indonesia “Guru Indonesia mengakui bahwa pendidikan adalah surganya ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya.” Dalam kongres ke XIV ini cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud dalam kongres ini adalah guru belum ada pembinaan yang terarah sehingga peraturan pengelolaan dan pembinaannya sangat beraneka ragam dan menimbulkan kurangnya keefesienan dan keefektifan pengelolaan sekolah.

### **Kongres XV**

Yang diketuai oleh , ketua umum : Basyuni Suriamiharja, ketua : Dr. Anwar Jasin, M.Ed, ketua : Prof. Dr Amran Halim yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 16 sampai 21 Juli tahun 1984. Pada tahun 1986 terdapat perubahan yang dilalui Konferensi Pusat III Masa Bakti dimana dikeluarkannya UU No.8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan yang menegaskan dalam AD/ART bahwa PGRI merupakan organisasi profesi. Pada Masa Bakti ke-XV karya besar PGRI adalah dengan membangun Gedung Guru Indonesia (GGI) yang dibangun mulai 20 Maret 1986 yang berada di Jakarta Jl. Tanah Abang III No.24 dan diserahkan pada PGRI pada tanggal 21 Maret 1987 dan kemudian diresmikan Presiden Soeharto 21 April 1987. Pada kongres XV ini menghasilkan 1. Penyempurnaan AD/ART, 2. Menguraikan pokok-pokok PGRI untuk lima tahun ke depan (1984-1989), ruang lingkup, pengembangan organisasi PGRI, peran PGRI dalam ikut serta dalam SU MPR 1983, Repelita IV dan kabinet pembangunan Panchakrida yang sukses dan pembangunan V(Wulandari, dkk., 2022)

### **Kongres XVI**

Yang diketuai oleh, ketua umum: Basyuni suriamiharja, ketua: Drs. I Gusti Agung Gde Oka. pada kongres ini dilakukan di Jakarta pada tanggal 3 sampai 8 Juli tahun 1989, dengan diadakan kongres ini telah memutuskan tentang adanya ikrar guru Indonesia yang memiliki rumusan yaitu kami guru Indonesia taat pada kode etik guru Indonesia, kami juga pengemban, pengamal, dan pembela Pancasila yang bertekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Zuwardi, 2022). Serta guru wajib beriman dan bertaqwa. Hasil dari kongres ini: 1. Sikap dan pernyataan tentang sistem pendidikan nasional terhadap keluarnya UU No.2,

2. Meningkatkan usaha koperasi guru, 3. Sikap dan pernyataan terhadap keputusanmenpan No. 26/menpan/1989, berharap agar diberlakukannya sistem Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO). Cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud pada kongres ini adalah Sistem pendidikan nasional belum bisa Meningkatkan usaha koperasi guru, dan juga masih berharap agar masih diberlakukannya sistem Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) yang berdampak pada kinerja guru.

### **Kongres XVII**

Yang diketuai oleh, ketua umum: Basyuni suriamiharja, ketua: Drs. I Gusti Agung GdeOka. Pada kongres ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3 sampai 8 Juli tahun 1994. Terjadi kongres terbesar yang memiliki peserta sebanyak 13.000 orang. Hasil dari kongres ini yaitu menetapkan dewan pembina di angkat menjadi dewan penasehat dan terbentuknya tim penulis buku yang berjudul “sejarah PGRI dari masa ke masa” dan pada kongres ini juga berhasil menyusun strategi perjuangan dalam jangka waktu 25 tahun Keinginan masyarakat daerah disebabkan oleh tunjangan fungsional. Tunjangan guru terpencil belum ada realisasi, dan fasilitas yang belum memadai. Melalui keluarnya Kepres No. 78/1994 (Anjani & Rahmadi, 2022). Melalui keluarnya Kepres No. 78/1994. Ditetapkannya setiap tanggal 25 November sebagai hari guru nasional. Cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud pada kongres ini adalah tunjangan guru terpencil belum ada realisasi dan fasilitas yang belum memadai.

### **Kongres XVIII**

Yang diketuai oleh, ketua umum: Prof. Dr. H. Mohammad surya, ketua: Drs. H. Alwi Nurdin, MM. pada kongres ini diselenggarakan pada tanggal 25-28 November 1998 di Lembang, Bandung. Terjadi perubahan yang dulunya pemilihan ketua selalu menggunakan cara dalam mengambil keputusan dengan cara tepuk tangan, kini menjadikan mulai munculnya peraturan antara kedua calon ketua, sebid diganti ketua. Tumbangnya pemerintahan rezim orde baru yang ditandai oleh orde reformasi (Prasetyo, dkk., 2020). Sesuai Pancasila dan UUD 1945 sifat reformasi kembali ke demokrasi, dengan menggunakan demokrasi maka akan mempercepat kongres PGRI beberapa bulan dari yang telah dijadwalkan. Mahasiswa mendapatkan penghargaan dari PGRI karena telah mempelopori perubahan orde baru ke era reformasi. Adapun hasil dari kongres ini merupakan PGRI sebagai organisasi perjuangan, tenaga kependidikan, dan profesi. Cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud pada kongres ini adalah belum bisa konsisten dalam mengambil suatu keputusan.

### **Kongres XIX**

Yang diketuai oleh, ketua umum: Prof. Dr. H. Mohammad surya, ketua: W.D.F. Rindo Rindo. Kongres ini diselenggarakan di Jawa Tengah pada tanggal 8 sampai 12 Juli tahun 2003 di hotel Patra Jasa Semarang. Selain susunan pengurus pada masa bhakti 2003-

2008. Pada kongres ini juga mendapatkan hasil bahwa; 1. PGRI meminta agar jaminan keamanan guru kepada pemerintahan pusat, 2. Penegasan jati diri PGRI, 3. PGRI juga mengadakan UU guru dan dosen, 4. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah didesak oleh PGRI agar menyediakan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD (Anjani & Rahmadi, 2022). Cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud pada kongres ini adalah jaminan keamanan guru kepada pemerintahan pusat juga belum ada fasilitas dari pemerintahan daerah agar menyediakan paling sedikit 20%.

### **Kongres XX**

Yang diketuai oleh, ketua umum: Dr. Sulistiyo, M.Pd, ketua: Prof. Dr. Anah Suhaenah. Kongres ini diadakan di Palembang, Sumatra selatan bertempat di hotel Novotel. Pada tanggal 30 Juni sampai 4 Juli tahun 2008. Pada kongres ini menuai hasil 1. Dewan kehormatan guru telah ditetapkan, 2. Menjadikan PGRI yang lebih kuat dan bermartabat, 3. PGRI memberi himbuan kepada pemerintah agar semua guru sudah bersertifikat pendidik (Illahi, 2020). Kongres ini dihadiri oleh 1728 peserta yang mempunyai tekad agar berhasilnya pemilu pada tahun 2009. Cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud pada kongres ini adalah Pemerintah menginginkan agar semua guru sudah bersertifikat pendidik.

### **Kongres XXI**

Yang diketuai oleh, ketua umum: DR. Sulistiyo, M.Pd, ketua: Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. kongres ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 01 sampai 05 Juli tahun 2013 bertempat di Istora Senayan. Kongres ini dihadiri sekitar 8000 guru dari berbagai kabupaten dan kota di 33 provinsi. kongres ini memiliki tema yang berjudul “peran strategis PGRI sebagai organisasi profesi guru Indonesia dalam mewujudkan guru yang bermartabat menuju pendidikan bermutu” (Budoyo, 2017). Dalam kongres ini mendapatkan hasil bahwa ada perubahan AD/ART PGRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penegasan urutan jati diri PGRI yang bermula dari perkumpulan profesi, kelompok perjuangan dan organisasi buruh. Dengan diadakannya kongres-kongres tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan melengkapi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pendidikan dan Pendidikan secara kerakyatan serta sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan.

## **IV. KESIMPULAN**

Dalam kongres X cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud adalah PGRI tidak boleh masuk atau terlibat dalam politik, dimana Kongres X menyatakan bahwa memasukkan Manipol-Usdek (Manifesto Politik/Undang-Undang Dasar 1945) sebagai dasar PGRI, terlihat jelas ada penyusupan PKI kedalam tubuh PGRI. Pada kongres XI awal tahun 1967 setelah melewati persiapan dimana

selama tahun 1966 PGRI disibukkan dengan tugas-tugas utama Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) dan konsolidasi organisasi dalam mempersiapkan kongres “PGRI Orde Baru” (kongres XI) di Bandung. Hal ini cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud dalam kongres XII ini adalah guru belum bisa mencapai standar profesional yang berkaitan dengan kinerja masih banyak guru yang melakukan pelanggaran kode etik. Dalam kongres XIII PGRI merupakan satu-satunya organisasi profesi guru di Indonesia yang menentukan sikap politiknya untuk ikut serta dalam menyampaikan aspirasi melalui Golkar yang sebagaimana tertuang dalam piagam PGRI. Manfaat dari keputusan ini didukung oleh pemerintah dan Golkar sehingga anggota merasa mudah untuk mendapatkan posisi dan dana yang ditawarkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hingga akhir tahun 1979 masih belum adanya pembinaan yang terarah sehingga peraturan tentang pengelolaan dan pembinaannya sangat beraneka ragam dan menimbulkan kurangnya keefesienan dan keefektifan pengelolaan sekolah. Dalam kongres ke XIV ini cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud dalam kongres ini adalah guru belum ada pembinaan yang terarah sehingga peraturan pengelolaan dan pembinaannya sangat beraneka ragam dan menimbulkan kurangnya keefesienan dan keefektifan pengelolaan sekolah. Pada tahun 1986 terdapat Perubahan yang melalui Konferensi Pusat III Masa Bakti dimana dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan yang menegaskan dalam AD/ART bahwa PGRI merupakan organisasi profesi. Pada Masa Bakti ke-XV karya besar PGRI adalah dengan membangun Gedung Guru Indonesia (GGI) yang dibangun mulai 20 Maret 1986 yang berada di Jakarta Jl. Tanah Abang III No.24 dan diserahkan pada PGRI pada tanggal 21 Maret 1987 dan kemudian diresmikan Presiden Soeharto 21 April 1987.

Sikap dan pernyataan terhadap keputusan menpan No. 26/menpan/1989, berharap agar diberlakukannya sistem kenaikan pangkat otomatis. Cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud pada kongres ini adalah Sistem pendidikan nasional belum bisa Meningkatkan usaha koperasi guru, dan juga masih berharap agar masih diberlakukannya sistem kenaikan pangkat otomatis yang berdampak pada kinerja guru. Pada kongres ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 03 sampai 08 Juli tahun 1994. Tunjangan guru terpencil belum ada realisasi, dan fasilitas yang belum memadai. Cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud pada kongres ini adalah tunjangan guru terpencil belum ada realisasi dan fasilitas yang belum memadai. Sesuai Pancasila dan UUD 1945 sifat reformasi kembali ke demokrasi, dengan menggunakan demokrasi maka akan mempercepat kongres PGRI beberapa bulan dari yang telah dijadwalkan. Mahasiswa mendapatkan penghargaan dari PGRI karena telah memelopori perubahan orde baru ke era reformasi. Cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud pada kongres XIX adalah jaminan keamanan guru kepada pemerintahan pusat dan juga belum ada fasilitas dari pemerintahan daerah agar menyediakan paling sedikit 20%. Pada kongres XX Cita-cita bangsa Indonesia yang belum terwujud pada kongres ini adalah Pemerintah menginginkan agar semua guru sudah bersertifikat pendidik. Kongres XXI diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 01 sampai 05 Juli tahun 2013. Pada kongres ini mendapatkan hasil bahwa ada perubahan AD/ART PGRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penegasan urutan jatidiri PGRI yang bermula dari perkumpulan profesi, kelompok perjuangan dan organisasi buruh. Dengan diadakannya kongres-kongres tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan melengkapi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pendidikan dan Pendidikan secara kerakyatan serta sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan.

## REFERENSI

Anggraini Ningsih, N. R. (2014). PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLP DASMEN PGRI) JAWA TIMUR TAHUN 2002-2005.

AVATARA, *e-Journal Pendidikan Sejarah*, 2(3), 347–356.  
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

- Anjani, K. T., & Rahmadi, D. (2022). *PERJUANGAN PGRI DALAM MENSEJAHTERAKAN GURU: KONTRIBUSI PGRI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN TAHUN 2005*.
- Budoyo, S. (2017). *PERSEPSI GURU GUGUS WIJAYA KUSUMA UPTD*.
- Fernando, R. O. (2017). *KOPETENSI PROPESSIONAL GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS VIII SMP N 10 BANDAR LAMPUNG*.
- Hastantyo, G., Wartoyo, & Prasetyo, Y. (2019). *PASANG SURUT PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) PASCA REFORMASI TAHUN 1998 – 2005 DI JAWA TIMUR*. 1–8.
- Illahi, N. (2020). Peranan Guru Profesional Dalam Peningkatan Prestasi Siswa Dan Mutu Pendidikan Di Era Milenial. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.94>
- Nursidik, B. (2019). *PGRI KONGRES MELAWAN PGRI NONVAKSENTRAL TAHUN 1962-1967*. 1–15.
- Prasetyo, A., Wargadalem, F. M., & Dhita SBK, A. N. (2020). DINAMIKA KONFLIK ANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA DAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA. *Pendidikan Dan Sejarah*, 16(1), 1–16.
- Wandi, Z. N., & Nurhafizah, N. (2019). Etika Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Padang Timur Kota Padang. *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 3(4), 33–41. <https://doi.org/10.33578/pjr.v3i4.7453>
- Wulandari, R. E., YATMIN, Y., & BUDIANTO, A. (2022). *STUDY TENTANG GOA UMBUL TUK SEBAGAI TEMPAT PERSEMBUNYIAN SISA-SISA G30S/PKI DI BLITAR SELATAN TAHUN 1968*.
- Yuniastik, L. (2013). Implementasi Kebijakan Organisasi PGRI dalam. *Jurnal Pendidikan*, 1(1), 30–36.
- Zuwardi, M. T. (2022). *Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Anak Bangsa*. hal 2.